

RENCANA KERJA



@BKNgoid



@BKNgoidofficial



www.bkn.go.id

**Deputi Bidang Sistem
Informasi Kepegawaian**

Badan Kepegawaian Negara

**20
24**

RENCANA KERJA
DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2024

Daftar Isi

RENCANA KERJA	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Ruang Lingkup	5
1.5. Maksud dan Tujuan	5
BAB II	7
EVALUASI KINERJA 2024	7
2.1 Visi dan Misi.....	7
2.2 Tujuan	7
2.3 Sasaran Strategis	7
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja	11
IKU 1. Indeks Kepuasan Instansi Terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan ..	11
Informasi ASN	11
IKU 2. Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN.....	12
IKU 3. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	13
IKU 4. Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN	13
IKU 5. Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN.....	14
IKU.6 Persentase Integrasi SIASN	15
IKU.7 Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN.....	17
IKU.8 Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK	18
IKU.9 Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kegiatan di	
Lingkungan Deputy Bidang SINKA.....	19
IKU.10 Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang SINKA	19
IKU.11 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Terstandar	20
IKU.13 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputy	
Bidang SINKA	21
IKU.14 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang	
SINKA	22
IKU.15 Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan BPK/Inspektorat.....	22
BAB III. PERENCANAAN KINERJA 2024	23
3.1 Kebijakan Nasional 2024.....	23
3.2 Program Prioritas Nasional 2024	23
3.3 Indikator dan Target Kinerja 2024.....	24
BAB IV. PENUTUP	49

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Manajemen ASN, pada tahun anggaran 2024 Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024. Rencana Kerja ditetapkan pada tahun perencanaan yang selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tahun 2024;
2. Rencana Kerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
9. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
12. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 ini merupakan pedoman seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dalam melaksanakan

program dan kegiatan Kebijakan, pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN pada tahun 2024. Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian selama Tahun 2023;
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian tahun 2023;
3. Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2023

1.4. Ruang Lingkup

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian seperti yang tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara No.29 Tahun 2020 sebagai berikut:

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian bertugas untuk melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang sistem informasi manajemen kepegawaian;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Deputi SINKA disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan Direktorat di Lingkungan Kedeputian SINKA serta untuk menjaga kesinambungan Renstra Deputi SINKA 2020-

2024. Selain itu tujuan penyusunan Rencana Kerja Deputy SINKA Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Deputy SINKA selama tahun 2024;
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Deputy SINKA tahun 2024;
3. Sebagai kendala dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian Deputy SINKA tahun 2024

BAB II

EVALUASI KINERJA 2024

2.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara adalah “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Deputi bidang Sistem Informasi Kepegawaian memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pengembangan sistem informasi ASN terintegrasi berdasarkan sistem merit dan meningkatkan kualitas data ASN.

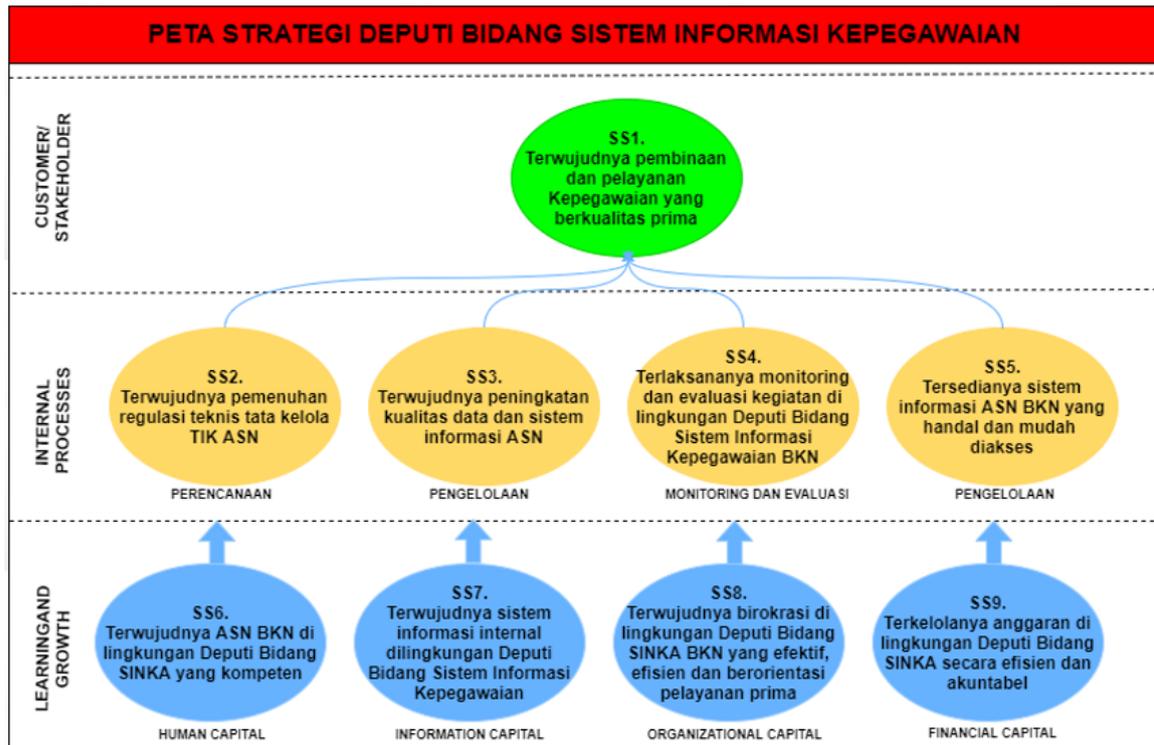
2.2 Tujuan

Sesuai dengan rencana strategis Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Tahun 2020 – 2024 adalah melaksanakan Sasaran Strategis ke 4 (empat) Badan Kepegawaian Negara yaitu : “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN”. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Bidang Sistem Informasi Kepegawaian sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan.

2.3 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis tersebut merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan sasaran strategis Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yakni *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*

PETA STRATEGI DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN



Gambar 1 Peta Strategi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

CUSTOMER PERSPECTIVE

- 1) Sasaran strategis 1 (satu) yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima”, dengan indikator kinerja :
 - a. Indeks kepuasan instansi terhadap pembinaan pengelolaan data dan informasi Aparatur Sipil Negara;
 - b. Indeks kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi Aparatur Sipil Negara.

INTERNAL PERSPECTIVE (BUSINESS PROCESS)

- 2) Sasaran strategis 2 (dua) yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya pemenuhan regulasi teknis tata kelola Teknologi Informasi Komunikasi Aparatur Sipil Negara”, dengan indikator kinerja berupa persentase pemenuhan regulasi teknis tata kelola Teknologi Informasi Komunikasi Aparatur Sipil Negara
- 3) Sasaran strategis 3 (tiga) yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi Aparatur Sipil Negara”, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase optimalisasi kualitas data ASN;
 - b. Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN
 - c. Persentase integrasi sistem informasi ASN;

- d. Persentase digitalisasi arsip Kepegawaian ASN;
 - e. Persentase tingkat ketersediaan infrastruktur TIK.
- 4) Sasaran strategis 4 (empat) yang ingin dicapai adalah “Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara”, dengan indikator kinerja:
- a. Persentase tindak lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi SINKA.

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

- 5) Sasaran strategis 6 (enam) yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara yang kompeten di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian”, dengan indikator kinerja : Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
- 6) Sasaran strategis 7 (tujuh) yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputi Bidang SINKA”, dengan indikator kinerja berupa Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang Terstandar.
- 7) Sasaran strategis 8 (delapan) yang ingin dicapai adalah “Terwujudnya birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan prima adalah, dengan indikator kinerja:
- a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi SINKA;
 - b. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.
- 8) Sasaran strategis 9 (sembilan) yang ingin dicapai adalah “Terkelolanya anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian secara efisien dan akuntabel”, dengan indikator kinerja:
- a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
 - b. Persentase tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengacu pada arah kebijakan dan strategi RPJMN Badan Kepegawaian Negara 2020-2024.

1. Penguatan Kelembagaan

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian melaksanakan penguatan kerangka kelembagaan BKN melalui penyediaan data kepegawaian ASN yang akurat dan terkini dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu dilakukan penataan ulang organisasi dilingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk penguatan tugas dan fungsi serta penyempurnaan hubungan kerja.

2. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

Penataan kelembagaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan pembangunan Proses Bisnis Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara dilakukan untuk mendukung dan merespon kebijakan pemerintah terkait dengan fungsi Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga tercipta tata laksana BKN yang sinergis, harmonis, efektif, dan efisien dalam upaya menghadapi tantangan, perubahan yang begitu cepat, serba digitalisasi di era Transformasi Teknologi Informasi yang berkembang sangat cepat.

3. Sistem Informasi ASN Terintegrasi

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 47, BKN memiliki fungsi yang salah satunya adalah : “penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN” dan Pasal 48, mengatur tugas BKN yang salah satu menjadi tugas Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara adalah “mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif. Sehingga substansi kebijakan kepegawaian yang harus diatur pada tahun 2020-2024 terkait dengan Sistem Informasi ASN dan Sistem Manajemen Pemberhentian dan Pensiun.

4. Layanan Data Data Kepegawaian ASN Terintegrasi

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Badan Kepegawaian Negara merupakan pengelola data ASN bertugas untuk dapat mewujudkan satu data ASN yang didukung dengan pengelolaan data secara terintegrasi, akurat dan terkini.

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

IKU 1. Indeks Kepuasan Instansi Terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
80	85	87	88	95	81,59	85,21	85,82	98,64%

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan instansi pusat dan daerah dalam pemberian dukungan pembinaan sistem informasi ASN yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif. Capaian indikator ini diperoleh dari Wawancara maupun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dilakukan oleh 3 (tiga) Direktorat, yaitu Direktorat PPSIASN, Direktorat PDPIK, dan Direktorat Arsip Kepegawaian.

Pada tahun 2022 realisasi IKU.1 ini sebesar 85,82 masih di bawah target tahun 2022 sebesar 87. Realisasi ini diperoleh dari hasil rata-rata realisasi ketiga Direktorat, yaitu Direktorat PPSIASN, Direktorat PDPIK, dan Direktorat AK.

Pada tahun 2023 realisasi IKU.1 ini sebesar 88,94 di atas target tahun 2023 sebesar 88. Rencana tindak lanjut untuk tahun selanjutnya antara lain:

- Mekanisme pemberian survei diberikan setelah pemberian pembinaan oleh Direktorat kepada penerima;
- Pelaksanaan pengolahan survei dilakukan setiap triwulan agar target 95 untuk indeks kepuasan dapat tercapai

IKU 2. Indeks Kepuasan Pengguna atas Layanan Data dan Informasi ASN

Target				2024	Realisasi			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	
80	85	87	88	95	80,84	84,59	85,34	98,09%

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan instansi pusat dan daerah dalam pemberian layanan yang berkaitan dengan sistem informasi ASN, pengelolaan data dan penyajian informasi kepegawaian, informasi arsip kepegawaian ASN serta infrastruktur teknologi informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif. Capaian indikator ini diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 yang dilakukan oleh semua Direktorat di Deputi SINKA.

Pada tahun 2022 realisasi IKU.2 ini sebesar 85,34 masih di bawah target tahun 2022 sebesar 87. Realisasi diperoleh dari hasil rata-rata realisasi empat Direktorat, yaitu Direktorat PPSIASN, Direktorat PDPIK, Direktorat AK, dan Direktorat INTI. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama dengan penanggung jawab Survei dari masing-masing Direktorat ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi realisasi Indeks kepuasan instansi terhadap Pembinaan Pengelolaan Data dan Informasi ASN, yaitu:

1. Pertanyaan tidak fokus pada sasaran yang dituju karena dilakukan survei gabungan hal tersebut mengakibatkan turunnya jumlah responden
2. Responden mengeluhkan terlalu banyak pertanyaan dari gabungan 4 direktorat sehingga responden tidak tertarik untuk mengisi survei
3. Responden hanya mengisi pada layanan yang pernah digunakan/dimanfaatkan saja

Pada tahun 2023 terjadi kenaikan realisasi IKU.2 ini sebesar 88,15 dan sudah di atas target tahunan sebesar 88. Berikut ini adalah beberapa rencana tindak lanjut dalam melaksanakan survei kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi:

- Mekanisme pemberian survei diberikan setelah pemberian layanan oleh Direktorat kepada pegawai;
- Pelaksanaan pengolahan survei dilakukan setiap triwulan agar target 95 untuk indeks kepuasan dapat tercapai

IKU 3. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN

Target (persentase)					Realisasi (persentase)			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
75	100	100	100	100	75	75	99,37	99,37%

Indikator ini mengukur perbandingan pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK ASN yang diusulkan dengan regulasi teknis yang direncanakan pada tahun 2020.

Pada tahun 2022 realisasi indikator Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN sebesar 99,37%. Capaian pada tahun 2022 ini tidak mencapai 100% dikarenakan Peraturan BKN tentang SI ASN telah sampai pada tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan belum dapat ditetapkan pada tahun 2022.

Beberapa kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan pemenuhan regulasi teknis tata Kelola TIK ASN ini antara lain:

- Belum ditetapkannya pengaturan perlindungan data pribadi s.d akhir tahun 2022
- Internalisasi tidak sesuai dengan jadwal rencana kerja yang telah disusun

Pada tahun 2023 realisasi IKU.3 ini sebesar 98% juga tidak mencapai target tahunan 100%. Hal ini dikarenakan realisasi dari Direktorat AK sebesar 90% mengalami penurunan sebesar 10% dibandingkan tahun 2022. Terdapat Surat Edaran BKN pada tahun 2023 yang belum disahkan. Surat Edaran BKN masih berupa rancangan dalam tahap penyempurnaan dan pembahasan internal. Kendala yang dihadapi antara lain:

- Konsultasi dengan pakar atau akademisi yang berpengalaman dan memahami penyusunan kebijakan bidang kearsipan
- Konsultasi dengan instansi terkait

IKU 4. Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN

Target (persentase)					Realisasi (persentase)			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
80	95	96	97	100	95	94,97	97,15	99,37%

Peningkatan kualitas data ASN adalah upaya pengelolaan data dalam rangka penyediaan data dan informasi kepegawaian ASN pada instansi pemerintah (K/L/D/stakeholder) yang valid dan termuktahir melalui kegiatan-kegiatan seperti penyelesaian disparitas data ASN, pemutakhiran data ASN, pengelolaan tabel

referensi, sinkronisasi database ASN, kerjasama pemanfaatan data kepegawaian, penyajian data statistik ASN, layanan data seleksi, penyajian data analytics, dan pemenuhan dukungan pengembangan database ASN untuk aplikasi.

Pada tahun 2022 realisasi IKU.4 ini sebesar 97,15% sudah melebihi target tahunan sebesar 96.

Pada tahun 2023 realisasi IKU.4 sebesar 98,76 melebihi target sebesar 97%. Tercapainya target IKU.4 pada tahun 2023 ini didukung oleh koordinasi efektif antara BKN Pusat, Kantor-Kantor Regional, dan Instansi.

Terlepas dari tercapainya target IKU.5 ini, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan optimalisasi kualitas data ASN. Kendala tersebut antara lain persentase capaian optimalisasi kualitas data di tahun 2023 masih diukur berdasarkan serangkaian upaya peningkatan kualitas data seperti rekonsiliasi data, pepadanan data, penyelesaian disparitas data, kegiatan verval data, penyelesaian pengaduan data kepegawaian, dsb. Hal ini dikarenakan belum adanya instrumen standar yang dapat mengukur kualitas data kepegawaian yang dikelola oleh BKN.

Tindak lanjut yang akan dilakukan di tahun berikutnya antara lain:

- Penyusunan instrumen pengukuran kualitas data, masuk kedalam program kerja Direktorat PDPIK di tahun 2024
- Target penyelesaian disparitas data pada tahun 2023 adalah sebesar 50% dengan capaian sebesar 58% di tahun 2023. Penyelesaian atas sisa disparitas data pada tahun 2023 akan masuk dalam program kerja Direktorat PDPIK di tahun 2024

IKU 5. Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN

Target (persentase)					Realisasi (persentase)			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
100	100	100	100	100	84	80	87,16	87,16%

Target IKU.5 tahun 2022 belum dapat secara penuh direalisasikan dan memperoleh capaian kinerja sebesar 87,16%. Capaian tersebut didapat dari perhitungan jumlah realisasi pembangunan dan pengembangan subsistem SIASN ditambah jumlah realisasi pembangunan dan pengembangan aplikasi yang terhubung dengan SIASN

dibandingkan dengan jumlah rencana pembangunan dan pengembangan subsistem SIASN ditambah jumlah rencana pembangunan dan pengembangan aplikasi yang terhubung dengan SIASN.

Terjadi penurunan realisasi indikator Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN sebesar 86,33% pada tahun 2023. Beberapa kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2023 antara lain:

- Proses Verifikasi Infojab memakan waktu sehingga tidak bisa dilakukan testing Pertek Formasi
- Proses bisnis yang belum fix pada unit pengampu dilayanan Manajemen JF
- Dalam pengembangan Layanan Talent Pool terjadi Perubahan Draft regulasi pada kebijakan TM membuat cakupan pembangunan TM menjadi terkendala
- Ketersediaan data pendukung dalam pembangunan Talent Manajemen seperti potensi, data standar kompetensi teknis, data, data rumpun jabatan, data kompleksitas pekerjaan

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah kolaborasi SDM Pranata Komputet pada BKN Pusat dan Kntor Regional.

IKU.6 Persentase Integrasi SIASN

Target (persentase)					Realisasi (persentase)			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
85	90	95	100	100	82	92,56	66,13	66,13%

Indikator ini menggambarkan integrasi sistem informasi kepegawaian ASN (Simpeg) instansi pemerintah secara menyeluruh dengan SIASN yang dilakukan melalui tools *web service* ataupun melalui pemanfaatan aplikasi Simpegnas (Sistem Informasi Kepegawaian Nasional) dalam rangka mewujudkan keterhubungan data ASN antara instansi pemerintah dan BKN. Pada 2022 BKN menargetkan sebanyak 95% instansi terintegrasi dengan SIASN, namun berbeda dengan dua tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat perluasan jangkauan target integrasi. Baseline perhitungan pada tahun 2020-2021 yaitu instansi yang memiliki simpeg dengan kategori maturitas level 3 dan level 4. Sementara untuk tahun 2022 ditargetkan integrasi pada seluruh instansi pemerintah atau sejumlah 626 instansi. Hal ini

menyebabkan pada tahun 2022 BKN belum dapat mencapai target, dengan realisasi sebesar 66.13% atau sebanyak 414 dari 626 instansi dengan rincian sebagai berikut:

	Unit Kerja	Pemanfaatan Simpegnas	Melalui Web Service	Total Instansi
1	BKN Pusat	36	27	63
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	12	29	41
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	13	17	30
4	Kantor Regional III BKN Bandung	15	19	34
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	16	14	30
6	Kantor Regional V BKN Jakarta	9	8	17
7	Kantor Regional VI BKN Medan	34	0	34
8	Kantor Regional VII BKN Palembang	6	21	27
9	Kantor Regional VIII Banjarmasin	9	18	27
10	Kantor Regional IX Jayapura	4	2	6
11	Kantor Regional X Denpasar	28	7	35
12	Kantor Regional XI Manado	7	25	32
13	Kantor Regional XII Pekanbaru	8	13	21
14	Kantor Regional XIII Aceh	4	7	11
15	Kantor Regional XIV Manokwari	6	0	6
	TOTAL	363	207	414

Beberapa kegiatan telah dilakukan untuk merealisasikan indikator ini diantaranya ialah dengan terus melakukan konfirmasi dan evaluasi secara berkala kepada instansi. Konfirmasi dan evaluasi dilakukan guna memfokuskan tim teknis dalam mengintegrasikan sistem pada setiap instansi, baik integrasi menggunakan tools *web service* maupun dengan pemanfaatan aplikasi Simpegnas. Integrasi Simpeg dengan menggunakan tools *web service* akan didorong melalui kegiatan bimbingan teknis agar setiap Admin dapat segera melakukan subscribe ke APIM Web Service.

Sementara upaya realisasi integrasi dengan pemanfaatan aplikasi Simpegnas dilakukan dengan mendorong instansi untuk memperoleh subdomain melalui proses bersurat Kepada BKN.

Beberapa kendala teknis ditemui dalam proses integrasi ini, diantaranya yaitu (1) kurangnya komitmen instansi dalam melaksanakan integrasi ini; (2) perbedaan struktur (coding) setiap sistem; dan (3) Sumber Daya Manusia dalam bidang IT di instansi belum memiliki kompetensi dalam mengoperasikan metode integrasi dengan SIASN. Ketiga hal ini membuat integrasi memakan waktu lebih lama dari seharusnya. Untuk dapat mencapai target kinerja ditahun selanjutnya, BKN akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan setiap pekannya Kepada instansi untuk menyelesaikan proses integrasi Simpeg dengan SIASN. Selain itu, BKN juga mendorong setiap instansi di wilayah kerja untuk menggunakan aplikasi Simpegnas.

IKU.7 Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN

Target (persentase)					Realisasi (persentase)			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
72	80	87	93	100	71,8	77,33	87,46	100,53%

Digitalisasi arsip kepegawaian adalah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penciptaan, penggunaan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan dan pemanfaatan arsip kepegawaian. Kegiatan digitalisasi arsip kepegawaian terdiri dari alih media dokumen kepegawaian (Pra Scan, scan, verifikasi dan validasi) dan pengelolaan dan pemeliharaan arsip kepegawaian fisik (reposisi tata naskah, perlabelan dan penggantian sampul rusak, retensi tata naskah dan penginputan serta penginputan dan penempelan RFID).

Pada tahun 2022 realisasi IKU.7 sebesar 87,46% sudah melampaui target tahun 2022 sebesar 87%. Tidak Tercapainya Target output kinerja disebabkan karena pada awal tahun sampai dengan pertengahan tahun terjadi perubahan jam masuk kerja WFO dan WFH sehingga tidak seluruh pegawai hadir di kantor.

Tindak lanjut atas permasalahan tersebut adalah permintaan penambahan SDM kepada Biro Kepegawaian dengan pembuatan aplikasi rekon takah dan penyusunan anjab dan ABK sesuai dengan kebutuhan.

Pada Tahun 2022 capaian Digitalisasi Arsip Kepegawaian yang dilakukan oleh Direktorat Arsip Kepegawaian adalah 2.940.780 atau 87,46% diatas target yang telah ditentukan diawal tahun.

Pada tahun 2023 realisasi telah melebihi target tahunan yaitu sebesar 95,63% dari target tahunan sebesar 93%. Terlepas dari capaian target tersebut, masih ditemui kendala dalam pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip kepegawaian antara lain keterbatasan jumlah SDM pada Direktorat Arsip Kepegawaian dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan alih media dan penyalinan dokumen kepegawaian. Tindak lanjut pada tahun berikutnya adalah penyusunan Anjab ABK untuk menganalisis kebutuhan pegawai dan melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana.

IKU.8 Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK

Target (persentase)					Realisasi (persentase)			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
99	99	99	99	99	96,7	99	99	100%

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi melalui layanan Direktorat INTI yang terdiri dari layanan pusat komputasi, layanan informasi dan komunikasi (layanan email, kolaborasi drive, konferensi video), layanan keamanan TI. Pada tahun 2022 realisasi IKU.8 sebesar 99% sesuai target.

Capain tersebut diperoleh karena selama tahun 2022, permintaan layanan telah terpenuhi semua dan tidak terjadi downtime dalam hal jaringan internet dimana target tahunan untuk durasi sistem dapat diakses selama satu tahun adalah 95% atau 8.322 jam.

Pada tahun 2023 realisasi kinerja IKU 3 sebesar 99,99% mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya. Capain tersebut diperoleh karena selama tahun 2023, permintaan layanan telah terpenuhi semua dan tidak terjadi *downtime*.

IKU.9 Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA

Target					Realisasi (persentase)			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
-	-	-	-	100%	-	-	-	100%

Indikator ini mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya “Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di lingkungan Deputi Bidang SINKA” menjadi “**Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Monitor dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputi Bidang SINKA**”. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian PAN RB di dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022 bahwasanya indikator kinerja dinilai masih berorientasi output, sehingga perlu diubah untuk mencerminkan orientasi outcome atas sasaran strategis yang dimaksud.

Indikator ini mengukur tindaklanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang SINKA pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

IKU.10 Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang SINKA

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
77	77	80	80	83	68,96	76,09	78,79	100,53%

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN BKN di lingkungan Deputi SINKA BKN. Perhitungan IP ini dilakukan secara mandiri dan manual dengan melakukan pengecekan nilai IP masing-masing pegawai di Direktorat di bawah Deputi Bidang SINKA, kemudian dirata-rata. Pengukuran dan perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia BKN.

Pada tahun 2022 hasil IP ASN Deputi Bidang SINKA sebesar 78,79 hampir mencapai target sebesar 80. Pada tahun 2023 hasil IP ASN Deputi Bidang SINKA sebesar 82,62 sudah meningkat dari tahun sebelumnya dan melampaui target tahunan sebesar 80. Tindak lanjut pada tahun berikutnya adalah mendorong Direktorat Infrastruktur TI

dengan indeks profesionalitas masih di bawah target (77,54) agar pegawainya lebih sering mengikuti pelatihan serta tidak lupa untuk segera melakukan pembarharuan data pelatihan pada MyASN.

IKU.11 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Terstandar

Target (persentase)					Realisasi (persentase)			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
90	100	100	100	100	100	100	100	100%

IKU.11 ini menjelaskan penggunaan sistem informasi internal sebagai penunjang pelayanan kepegawaian yang handal dan mudah diakses untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi tersebut antara lain:

1. LBP
2. presensi
3. kinerja
4. simpeg
5. CMB
6. Email
7. Loker
8. DS
9. Srikandi
10. Sakti
11. Om Span
12. Emonev
13. Spektra
14. EDMS

Realisasi IKU.11 selalu stabil dari tahun ke tahun dikarenakan semua aplikasi tersebut secara rutin digunakan oleh semua unit kerja di Lingkungan Deputi SINKA.

IKU.12 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang SINKA

Target					Realisasi			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
-	-	-	100%	100%	-	-	-	95,21%

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor 216/PR.07.03/ND/A.IV/2023 terdapat perubahan nomenklatur IKU.12 yang awalnya “**Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA**” menjadi “**Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di Lingkungan Deputi SINKA**”.

Pada tahun 2023 realisasi IKU.12 ini dimulai pada TW IV dengan realisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Tindak lanjut pada tahun berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan rencana aksi yang telah disusun oleh semua Direktorat di Lingkungan Deputi Bidang SINKA.

IKU.13 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SINKA

Target				2024	Realisasi			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	
65	75	79	81	85	68,05	72,75	72,85	92,22%

Indikator ini merupakan nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja di lingkungan Deputi Bidang SINKA. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 72,85 masih jauh dari target sebesar 79. Berdasarkan penilaian LHE Deputi Bidang SINKA pada tahun 2023, nilai yang didapatkan adalah 67,45 dengan predikat B. Nilai ini masih sangat jauh dari target tahun 2023 yaitu sebesar 81. Tim Manajemen Kinerja Organisasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA telah melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan Tim Inspektorat untuk menindaklanjuti hasil LHE.

Rencana tindak lanjut untuk tahun 2024 yaitu menindak lanjuti hasil LHE dari Inspektorat.

IKU.14 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Deputi Bidang SINKA

Target (persentase)					Realisasi (persentase)			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
95	97	98	99	99	68,05	72,75	72,85	92,22%

Realisasi ini dihitung berdasarkan rata-rata dari jumlah realisasi anggaran masing-masing direktorat. Pada tahun 2021 realisasi IKU.14 sebesar 72,75% dari target 97%. Pada tahun 2022 realisasi IKU.14 sebesar 72,85% masih jauh dari target 98%. Terdapat pencapaian target pada tahun 2023 yaitu realisasi sebesar 99,07% dari target 99%. Realisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik karena pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Tindaklanjut untuk tahun 2024 untuk dapat meningkatkan realisasi IKU.14 ini antara lain Menyusun *timeline* untuk setiap kegiatan agar pelaksanaan kegiatan sesuai *timeline* yang telah ditentukan.

IKU.15 Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan BPK/Inspektorat

Target (persentase)					Realisasi (persentase)			Capaian Renstra s.d 2022
2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	
100	100	100	100	100	100	100	100	100%

Realisasi IKU.15 ini dihitung berdasarkan rata-rata dari persentase tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan BPK/Inspektorat dari masing-masing direktorat. Realisasi IKU.15 ini selalu sebesar 100% sesuai dengan target

BAB III. PERENCANAAN KINERJA 2024

3.1 Kebijakan Nasional 2024

Tema RKP Tahun 2024 berfokus pada percepatan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, arahan Presiden, hasil evaluasi Pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya.

Sehubungan dengan kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagai penjabaran tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka Visi dan Misi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 juga diselaraskan sebagai upaya periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Tujuan periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tersebut adalah "mewujudkan Masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan Pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

3.2 Program Prioritas Nasional 2024

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-626/MK.02.2023B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/007/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA2024.

Prioritas Nasional 2024 terkait Layanan Data ASN Terintegrasi. Badan Kepegawaian Negara melalui Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, memiliki kewenangan dalam mengelola data ASN, dan diberikan tanggung jawab melaksanakan salah satu Program Nasional untuk mewujudkan layanan data dan informasi ASN yang terintegrasi, akurat dan terkini. Program ini dijalankan dengan mengukur dan meningkatkan kualitas data ASN melalui kegiatan Sistem Informasi Manajemen ASN.

3.3 Indikator dan Target Kinerja 2024

IKU.1 Indeks kepuasan instansi terhadap pembinaan pengelolaan data dan Informasi ASN

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
81,59	85,21	85,82	N/A	95	95

Realisasi IKU.1 ini pada tahun 2022 sebesar 85,82 masih belum mencapai target tahun 2022 sebesar 87. Pada tahun 2024 IKU.1 ini ditargetkan mencapai nilai indeks 95 disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputy SINKA tahun 2024. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 IKU.1 masih belum ada realisasi karena perhitungan IKU.1 ini dilaksanakan per semester.

IKU.2 Indeks Kepuasan Pengguna Atas Layanan Data dan Informasi ASN

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
80,84	84,59	85,34	N/A	95	95

Realisasi IKU.2 ini pada tahun 2022 sebesar 85,34 masih belum mencapai target tahun 2022 sebesar 87. Pada tahun 2024 IKU.2 ini ditargetkan mencapai nilai indeks 95 disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputy SINKA tahun 2024. Sampai

dengan triwulan III tahun 2023 IKU.2 masih belum ada realisasi karena perhitungan IKU.1 ini dilaksanakan per semester.

IKU.3 Persentase pemenuhan regulasi teknis tata kelola TIK ASN

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
75%	75%	99,37%	N/A	100	100

Realisasi IKU.3 ini pada tahun 2022 sebesar 99,37% sedikit di bawah target tahun 2022 sebesar 100%. Pada tahun 2024 IKU.3 ini ditargetkan mencapai 100% disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputi SINKA tahun 2024. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 IKU.3 masih belum ada realisasi karena realisasi IKU.3 ini dilaksanakan diakhir semester II.

IKU.4 Persentase Optimalisasi Kualitas Data ASN

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
95%	94,97%	97,15%	90,02%	100	100

Realisasi IKU.4 ini pada tahun 2022 sebesar 97,15% sudah melampaui target tahun 2022 sebesar 96%. Pada tahun 2024 IKU.4 ini ditargetkan mencapai 100% disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputi SINKA tahun 2024. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 IKU.4 sudah ada realisasi sebesar 90,02%

IKU.5 Persentase Pembangunan dan Pengembangan SIASN

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
84%	80%	87,16%	N/A	100	100

Realisasi IKU.5 ini pada tahun 2022 sebesar 87,16% masih cukup jauh dari target tahun 2022 sebesar 100%. Pada tahun 2024 IKU.5 ini ditargetkan mencapai 100% disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputi SINKA tahun 2024. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 belum terdapat realisasi pada IKU.5 karena perhitungan dilakukan per semester. Namun, terdapat kegiatan pemeliharaan untuk layanan-layanan SIASN dan pengembangan layanan Talent Pool.

IKU.6 Persentase Integrasi Sistem Informasi ASN

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
82%	92,56%	66,13%	N/A	100	100

Realisasi IKU.6 ini pada tahun 2022 sebesar 66,13% masih jauh dari target tahun 2022 sebesar 95%. Pada tahun 2024 IKU.6 ini ditargetkan mencapai 100% disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputi SINKA tahun 2024. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 belum terdapat realisasi pada IKU.6 karena perhitungan dilakukan per semester. Namun, terdapat kegiatan pemeliharaan untuk layanan-layanan SIASN dan pengembangan layanan Talent Pool.

IKU.7 Persentase Digitalisasi Arsip Kepegawaian ASN

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
71,8%	77,33%	87,46%	94,40%	100	100

Realisasi IKU.7 ini pada tahun 2022 sebesar 87,46% sudah mencapai target tahun 2022 sebesar 87%. Pada tahun 2024 IKU.7 ini ditargetkan mencapai 100% disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputi SINKA tahun 2024. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 terdapat realisasi pada IKU.7 sebesar 94,40%.

IKU.8 Persentase Tingkat Ketersediaan Infrastruktur TIK

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
96,7%	99%	99%	N/A	99%	99%

Realisasi IKU.8 ini pada tahun 2022 sebesar 99% sudah sesuai dengan target tahun 2022 sebesar 99%. Pada tahun 2024 IKU.8 ini ditargetkan mencapai 99% disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputi SINKA tahun 2024. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 belum terdapat realisasi pada IKU.8 karena perhitungan dilakukan pada semester II. Namun, terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan pada triwulan III antara lain:

1. Penggantian beberapa perangkat switch yang telah usang dan obsolete
2. Pemeliharaan email dan beberapa software
3. Penyusunan Draft Kebijakan BCP dan DRP
4. Pembaruan SOP
5. Kegiatan Bimtek Kesiapsiagaan Penanganan Insiden Keamanan Informasi yang diikuti oleh seluruh pranata komputer di lingkungan BKN secara hybrid dengan narasumber dari BSSN

IKU.9 Persentase tindak lanjut atas hasil monitor dan evaluasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang SINKA

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
-	-	-	-	100%	100%

Pada tahun 2020 sampai 2023 IKU.9 target dan realisasinya dalam bentuk dokumen. Terdapat perubahan nomenklatur pada IKU.9 pada akhir tahun 2023, sehingga realisasi untuk IKU.9 dilakukan pada tahun 2024. Pada tahun 2024 IKU.9 ini ditargetkan mencapai 100% disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputi SINKA tahun 2024.

IKU.10 Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
68,96	76,09	78,85	N/A	83	83

Realisasi IKU.10 ini pada tahun 2022 sebesar 78,85% sedikit kurang mencapai target target tahun 2022 sebesar 80%. Pada tahun 2024 IKU.10 ini ditargetkan mencapai 83% disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputy SINKA tahun 2024. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 belum terdapat realisasi pada IKU.10 karena realisasi dilakukan pada semester II.

IKU.11 Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
100%	100%	100%	N/A	100%	100%

Realisasi IKU.11 ini pada tahun 2022 sebesar 100% sudah mencapai target tahun 2022 sebesar 100%. Pada tahun 2024 IKU.11 ini ditargetkan sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 100% disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputy SINKA tahun 2024. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 belum terdapat realisasi pada IKU.11 karena perhitungan dilakukan pada semester II. Namun, sistem informasi internal ini digunakan sepanjang tahun.

Pada tahun 2024 terdapat perbedaan sistem informasi yang digunakan antara lain:

1. LBP
2. presensi
3. kinerja
4. simpeg
5. CMB
6. Email
7. Loker
8. DS
9. Srikandi
10. Sakti

11. Om Span
12. Emonev
13. Spektra
14. EDMS

IKU.12 Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang SINKA

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
-	-	-	N/A	100%	100%

Pada tahun 2020 sampai 2022 IKU.12 target dan realisasinya dalam bentuk nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi SINKA. Terdapat perubahan nomenklatur pada IKU.12 pada akhir tahun 2023, sehingga realisasi untuk IKU.12 dapat dilakukan pada triwulan IV. Pada tahun 2024 IKU.12 ini ditargetkan mencapai 100% disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputi SINKA tahun 2024.

IKU.13 Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
68,05	72,75	72,85	N/A	85	85

Realisasi IKU.13 ini pada tahun 2022 sebesar 72,85 masih belum mencapai target tahun 2022 sebesar 79. Pada tahun 2024 IKU.13 ini ditargetkan mencapai 85 disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputi SINKA tahun 2024. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 belum terdapat realisasi pada IKU.13 karena realisasi dilakukan pada semester II.

IKU.14 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
94,78%	97,22%	98,32%	52,15%	99%	99%

Realisasi IKU.14 ini pada tahun 2022 sebesar 98,32% sudah mencapai target tahun 2022 sebesar 98%. Pada tahun 2024 IKU.13 ini ditargetkan mencapai 99% disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputi SINKA tahun 2024. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 sudah terdapat realisasi anggaran sebesar 52,15% dari target triwulan III sebesar 50%.

IKU.15 Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat

Realisasi				Target 2024	
2020	2021	2022	s.d TW III 2023	Renstra SINKA	Renja
100%	100%	100%	N/A	100%	100%

Realisasi IKU.15 ini pada tahun 2022 sebesar 100% sudah mencapai target tahun 2022 sebesar 100%. Pada tahun 2024 IKU.15 ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya ditargetkan mencapai 100% disesuaikan dengan target Rencana Strategis Deputi SINKA tahun 2024. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 belum terdapat realisasi pada IKU.15 karena realisasi dilakukan pada semester II. Beberapa kegiatan terkait tindak lanjut hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat pada triwulan III yang dilakukan masing-masing Direktorat di Lingkungan Deputi Bidang SINKA antara lain:

- pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan Belanja dan Aset Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2023
- menyusun draf SOP kegiatan penyediaan data penetapan kebutuhan ASN dan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan KemenpanRB
- pemeriksaan oleh BPK dengan hasil tidak ada temuan
- Progres tindak lanjut penyusunan revisi SOP SSCASN

3.4 Rencana Anggaran

Sebagai upaya dalam penyelarasan antara perencanaan kinerja dengan anggaran maka berikut data anggaran yang digunakan dalam rangka mewujudkan terealisasinya sasaran strategis BKN selama tahun 2024.

No.	Sasaran Strategis	Anggaran
1.	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima	Rp 49.580.000
2.	Terwujudnya Pemenuhan Regulasi Teknis Tata Kelola TIK ASN	Rp 176.597.000
3.	Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	Rp 123.867.554.000
4.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Deputy Bidang SINKA	Rp 178.000.000
5.	Terwujudnya ASN BKN di Lingkungan Deputy Bidang SINKA yang Kompeten	Rp 1.621.674.000
6.	Terwujudnya Sistem Informasi Internal di Lingkungan Deputy Bidang SINKA	-
7.	Terwujudnya Birokrasi di Lingkungan Deputy Bidang SINKA yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Rp 47,100,000
8.	Terkelolanya Anggaran di Lingkungan Deputy Bidang SINKA secara Efisien dan Akuntabel	Rp 71,925,000

BAB IV. PENUTUP

Penyusunan rencana kerja tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian 2020-2024, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan BKN (Perban) Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, dan juga mengacu pada Peta Strategi Badan Kepegawaian Negara dan Seputi Bidang SINKA BKN, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Untuk itu, Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024 ini merupakan acuan bagi unit eselon I dan eselon II mandiri di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tahun 2024. Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran Badan Kepegawaian Negara tahun 2024 perlu diambil langkah-langkah yang optimal melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik internal maupun eksternal

Deputi SINKA
Badan Kepegawaian Negara

\$